



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 14 September 2015.
Pukul	: 15.10 – 21.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.Nuroji/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L 2016; 2. Lain-lain.
Hadir	: 42 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H.Nuroji, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. PAGU ANGGARAN RAPBN TA 2016 SEBESAR RP49.232.799.474.000,-

1. Terhadap pagu anggaran (*sementara*) Kemendikbud RI RAPBN TA 2016 sebesar Rp49.232.799.474.000,- (*Empat puluh sembilan triliun dua*

ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Komisi X DPR RI akan mengkaji lebih lanjut.

2. Komisi X DPR RI **belum menyetujui** usulan pagu per unit utama di Kemendikbud RI, Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan melakukan pendalaman dalam bentuk RDP dengan Para Pejabat Eselon I dalam waktu dekat terhadap usulan pagu anggaran di masing-masing unit kerja / program sbb:

(dalam jutaan rupiah)

NO	UNIT UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RAPBN 2016
1	SEKJEN	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	2.889.931
2	ITJEN	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR	195.9412
3	DITJEN DIKDASMEN	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	27.827.599
4	DITJEN PAUD & DIKMAS	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	2.198.880
5	BALITBANG	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.414.078
6	BADAN BAHASA	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	499.171
7	DITJEN KEBUDYAAN	PELESTARIAN BUDAYA	1.635.554
8	DITJEN GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN	GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	12.571.645
		TOTAL	49.232.799

3. Dalam rangka pendalaman tersebut, Komisi X DPR RI memberikan beberapa masukan sebagai bahan perbaikan penyusunan program antar lain:
 - a) Masing-masing unit utama menyajikan usulan terinci berdasarkan fungsi, program, sasaran, dan anggaran;
 - b) Terhadap sasaran dan anggaran PIP, Kemendikbud RI perlu menyampaikan tingkat penyerapan tahun 2015, agar rencana sasaran dan anggaran PIP untuk tahun 2016 lebih realistis;
 - c) Terhadap program kebudayaan, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk lebih meningkatkan program, desa adat, komunitas budaya, taman budaya, dan museum-museum yang perlu direvitalisasi, serta program kebudayaan yang dikaitkan dengan satuan pendidikan;
 - d) Dalam rangka meningkatkan akses, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk menyajikan roadmap perbaikan ruang kelas, kebutuhan RKB, dan sarana prasarana lainnya;
 - e) Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan penyempurnaan kurikulum mulai dari ide, desain, dokumen, sampai implementasi;
 - f) Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk meningkatkan program beasiswa unggulan;

- g) Dalam rangka mewujudkan amanat UU Guru dan Dosen, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT).

B. ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN.

1. Terhadap postur anggaran fungsi pendidikan RAPBN TA 2016 yang disampaikan oleh Mendikbud RI dalam Raker, Komisi X DPR RI **belum menyetujui** postur anggaran fungsi pendidikan RAPBN TA 2016.
2. Terhadap DAK pendidikan, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk mengevaluasi juklak-juknis sampai dengan pelaksanaannya, serta dalam menentukan anggaran dan alokasi DAK Pendidikan di kab/kota agar Kemendikbud RI dilibatkan oleh Kemenkeu RI.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 21.00 WIB.

KETUA,



IR. H. NUROJI